

## PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN MUARADUA KISAM KABUPATEN OKU SELATAN

Dafina Rahmadani<sup>1)</sup>, Faridah<sup>2)</sup>, Siska Aprianti<sup>3)</sup>

Politeknik Negeri Sriwijaya  
email: dafinarahmadani15@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari bukti mengenai pencegahan fraud terhadap pengelolaan keuangan dana desa yang dilaksanakan di Kabupaten OKU Selatan, khususnya di Kecamatan Muara Dua Kisam. Penulis menelusuri bagaimana kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, transparansi dan moralitas individu untuk menghindari kecurangan dana desa. 18 Desa di Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dikaji dengan Populasi penelitian kepada semua aparatur pemerintah desa. menggunakan teknik penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan data variabel dependen. Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, sedangkan pada variabel lain memiliki hipotesis positif dan signifikan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkhusus kepada Aparatur Pemerintah Desa sehingga dapat mengelola dana desa dengan baik dan dapat menghindari fraud terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil pengujian diharapkan dapat meningkatkan Kompetensi Aparatur Desa dalam pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci:** Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Moralitas

### Abstract

*This research is intended to look for evidence regarding fraud prevention in the financial management of village funds carried out in South OKU Regency, especially in Muara Dua Kisam District. The author explores the competence of village officials, internal control systems, transparency and individual morality to avoid fraud in village funds. 18 villages in Muaradua Kisam District, South Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra Province were studied with a research population of all village government officials. uses quantitative research techniques to collect dependent variable data. The research hypothesis states that Village Apparatus Competence has a negative and significant effect on fraud prevention, while other variables have positive and significant hypotheses. It is hoped that these findings will provide particular benefits to Village Government Apparatus so that they can manage village funds well and avoid fraud in the management of village funds. Based on the test results, it is hoped that it can increase the competency of village officials in managing village funds.*

**Keywords:** Village Apparatus Competence, Internal Control System, Transparency, Morality

## 1. PENDAHULUAN

Terdapat tuntutan masyarakat mengenai terselenggaranya pemerintah yang transparan, dan bersih harus dilaksanakan dengan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang baik merupakan cara agar mendorong segenap pengendalian anggaran oleh pemerintah daerah dan pusat sesuai dengan undang-undang. Pemerintah berusaha menjalankan proses pembangunan di seluruh Indonesia dengan ditingkatkan pembangunan di desa-desa.

Untuk mencapai hal ini, pemerintah memberikan dana desa sebagai bagian dari Transer ke Daerah (TKD), yang dimaksudkan untuk mendukung dana penyelenggara pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dilansir dari situs resmi ([bpkad.kuningankab.go.id](http://bpkad.kuningankab.go.id)) dana desa yang diberikan sebesar Rp.70 Triliun dengan rincian pengalokasian sebesar Rp.68 triliun dibuat sebelum tahun anggaran belanja reguler sebesar Rp.2 triliun, serta dana desa yang dialokasikan untuk tahun berjalan. Anggaran dana desa di Indonesia dapat berubah setiap tahun karena jumlah rata-rata setiap provinsi.

Kebijakan dana desa dalam pemerintahan pusat dengan direalisasikan penyaluran dana desa untuk Pemerintah Desa. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan tepat sesuai dengan peraturan menteri yang sudah ditetapkan. Peraturan yang dibuat oleh bupati atau walikota menetapkan cara mana dana desa didistribusikan dan dialokasikan.

Dengan dana desa yang disediakan oleh pemerintah, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mengatakan dalam penerapan implementasinya masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa hal itu dapat mengarah pada kecurangan. Banyaknya kasus kecurangan dalam penggunaan dana desa bisa dilihat dari pemetaan kasus korupsi berdasarkan sektor pada tahun 2021, berdasarkan hasil pemantauan dari 10 sektor, pemetaan tersebut terbanyak di sektor anggaran dana desa yaitu sejumlah 154 kasus dana desa dan menjerat 245 tersangka dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.233,3 Miliar. Menurut Lalola Eisther, tuduhan korupsi yang melibatkan pemerintah daerah telah muncul dan meningkat sejak pemerintah federal mulai menyediakan dana untuk desa.

Kasus penyelewengan yang terjadi di sektor anggaran dana desa telah menciptakan catatan yang buruk tentang diskusi evaluasi kebijakan pemerintah untuk desa. ICW menyarankan pengawasan terhadap sektor anggaran desa harus diawasi dengan ketat, dan mendesak untuk mengetatkan pengawasan terhadap perangkat desa. Korupsi dana desa bahkan meningkat sejak tahun 2015 dengan angka jumlah kasus, jumlah tersangka, serta nilai kerugian negara terus meningkat secara signifikan.

Kasus kecurangan dalam pengelolaan dana desa juga terjadi di Kabupaten OKU Selatan Kecamatan Muaradua Kisam. terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa oleh Kepala Desa Tanjung Tebat Kecamatan Muaradua Kisam terkait penyimpangan proyek pembangunan melalui dana desa tahun anggaran 2021. Kasus ini menguak karena adanya keluhan dan laporan dari masyarakat setempat mengingat aturan jelas dalam penggunaan dana desa harus selesai 1 (satu) tahun berjalan, terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember sedangkan penggunaan Dana Desa Tanjung Tebat justru belum selesai sampai bulan Maret 2022, untuk hal tersebut kepala desa sebagai pengguna anggaran diduga telah melanggar Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk dapat mengelola jika dana desa didistribusikan dengan benar dan dengan tepat untuk kepentingan masyarakat, fraud harus dihindari. “Dengan menerbitkan dan menerapkan berbagai undang-undang dalam undang-undang, penipuan di sektor publik dapat dicegah dan dapat ditetapkan berbagai sanksi yang akan diperoleh pelanggar atau pelaku fraud yang diharapkan dapat mencegah dan mengurangi tindak kecurangan”. Karyono (2013:48). Efisiensi infrastruktur desa, kehandalan pengendalian internal, dan keterbukaan prosedur anggaran desa, dan moralitas individu adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mencegah penipuan dalam pengelolaan dana desa.

Disamping itu maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian karena banyaknya fenomena indikasi kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana desa. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk dapat mengambil fenomena tersebut yang diangkat menjadi topik penelitian berjudul “Pencegahan *Fraud*

Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan”.

## 2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1 Agency Theory

Dalam kerangka teori keagenan, pemimpin (agen) mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada pengikut (agen) (Iznillah *et al.*, 2018). Praktek manajemen keuangan perusahaan sektor publik didasarkan pada teori keagenan berkaitan dengan masalah keagenan, yang berfungsi sebagai agen atau memberi kewenangan untuk mengelola dana desa. Sebagai agen, pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola dana desa dari awal hingga akhir. Hubungan keagenan dapat digunakan untuk menetapkan peran masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan tanggung jawab pemerintah untuk mendengarkannya. Dalam hubungan keagenannya, pemerintah desa dan masyarakat dituntut untuk bertindak demi kepentingan masyarakat.

### 2.2 Teori Perkembangan Moral

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana individu sampai pada penilaian moral mereka, teori pertumbuhan moral yang dikemukakan oleh (Kohlberg, 1995) telah sering digunakan. Kekuatan utama teori pertumbuhan moral Kohlberg terletak pada penekanannya pada wawasan moral ke dalam tentang tindakan moral yang nyata. Semakin tinggi kedudukan moral seseorang, semakin jelas bahwa ia harus bertanggung jawab atas tindakannya.

### 2.3 Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut penelitian (Cahyadi & Sujana, 2020) Fraud merupakan Untuk memastikan penegakan aturan yang konsisten dan berkelanjutan, tindakan yang dapat melanggar aturan harus diambil, dan para pelanggar harus diberi sanksi tegas untuk mengurangi dan mencegah kecurangan terjadi lagi. Penelitian yang dilakukan (Soleman, 2013) Sistem pemeriksaan dan keseimbangan internal, atau "pengendalian internal", adalah serangkaian tindakan dan protokol yang diberlakukan dengan tujuan eksplisit untuk menggagalkan aktivitas penipuan.

### 2.4 Kompetensi Aparatur Desa

Keahlian manajemen keuangan adalah target umum bagi mereka yang ingin melakukan penipuan. Faktor yang dapat menyebabkan oknum kepala desa sering menyalahgunakan anggaran adalah ketidakkompetenan mereka dalam pengelolaan keuangan. (Armelia & Wahyuni, 2020). Dari apa yang telah dikatakan tentang bagaimana kompetensi aparatur desa mempengaruhi pencegahan penipuan, Jika keterampilan seperti itu ada, pencegahan penipuan pengelolaan keuangan desa harus ditingkatkan. Deskripsi ini menyarankan teori pertama:

**H1: Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.**

### 2.5 Sistem Pengendalian Internal

Konsep agensi dapat dikaitkan dengan konsep pengendalian internal. Prinsipal dan agen bekerja menuju tujuan yang terpisah, dan sering menyebabkan konflik keagenan, merupakan komponen penting dari teori agensi. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang bertindak untuk kepentingan mereka sendiri; pengendalian dan pengawasan yang buruk mengurangi kemungkinan penipuan. (Sahesti, 2015).

Sistem pengendalian internal membantu mengawasi pengelolaan keuangan dana desa dan mengurangi kecurangan. (Melinda *et al.*, 2022). Laporan keuangan harus dijamin dan disediakan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan, pengendalian internal harus mempunyai kebijakan serta prosedur yang jelas. (Wardani *et al.*, 2017), sehingga dapat disimpulkan bahwa kecurangan dapat dihindari, Jika mekanisme kontrol internal pemerintah desa berjalan efektif.

**H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan dana desa.**

### 2.6 Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Penelitian (Sugiharti & Hariani, 2021) Istilah "transparansi" mengacu pada kebijakan membuat semua operasi pemerintah, kebijakan, prosedur, dan hasil terbuka dan tersedia untuk publik.

Transparansi merupakan kebijakan informasi dan pengawasan terbuka untuk setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Untuk menghindari kecurangan dalam pengelolaan

keuangan dana desa, menurut beberapa kesimpulan dari penelitian tersebut harus dilaksanakan secara transparansi agar dana desa yang digunakan dapat dikelola secara jelas dan tepat. Berdasarkan uraian tersebut, Teori ketiga yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

**H3 : Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan dana desa.**

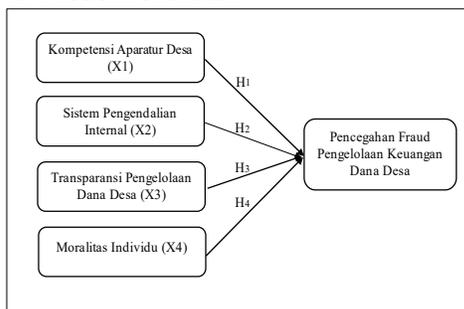
### 2.7 Moralitas Individu

Moral seseorang dapat berdampak pada etika dan perilaku mereka. Kecenderungan kecurangan akuntansi terkait dengan moralitas (Dennyningrat & Suputra, 2018).

Apakah suatu perusahaan rentan terhadap penipuan akuntansi tergantung pada moralitas karyawannya. Mereka yang memiliki moral yang kuat lebih kecil kemungkinannya untuk melanggar aturan atau terlibat dalam praktik tidak jujur demi keuntungan finansial (Armelia & Wahyuni, 2020). Moral bendahara desa sangat penting untuk menghindari pencurian uang rakyat. Berdasarkan ringkasan penelitian, hipotesis keempat adalah sebagai berikut:

**H4 : Moralitas Individu berpengaruh terhadap pencegahan Fraud pengelolaan keuangan dana desa.**

### 2.7 Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Berbasis positif, penelitian kuantitatif mengumpulkan dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik untuk menguji asumsi yang terbentuk sebelumnya tentang suatu populasi atau sampel. Penelitian ini mengkaji apakah kompetensi aparatur desa dapat menurunkan penggelapan dana desa di Kecamatan Muaradua Kisam OKU Selatan,

melembagakan mekanisme kontrol internal, meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa, atau meningkatkan moralitas individu.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data survei dari 18 desa di Kecamatan Muara Dua Kisam Kabupaten OKU Selatan yang disesuaikan dengan variabel dependen dan independen yang dianalisis.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Sebanyak 90 sampel diambil dari perangkat desa yang terdiri dari ketua desa, sekretaris, dan bendahara dikumpulkan dari 18 desa di Kecamatan Muara Dua Kisam, Kabupaten OKU Selatan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap desa. Sampling nonprobabilitas digunakan untuk tujuan penyelidikan ini.

Semua Populasi diambil sampelnya dengan menggunakan metode probabily sampling. Satu kepala desa, satu sekretaris desa, satu bendaharan desa dan 2 BPD yang terwakili dalam 18 desa di Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten OKU Selatan.

### 3.4 Metode Analisis Data

Data diperiksa dengan menggunakan program komputer bernama *Statistical Product and Service Solution* (SPSS).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas *One Sample Kolmogrov Smirnof*

Asumsi normalitas model regresi terpenuhi karena nilai *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test* lebih besar dari 0,05 atau 0,200.

- Hasil Uji Multikolonieritas

Hasil Uji Multikolonieritas menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki toleransi sebesar 0,968 dan VIF sebesar 1,033. Variabel X2 juga memiliki toleransi 0,791 lebih besar dari 0,10 dan VIF 1,264 lebih kecil dari 10. Selain itu, toleransi variabel X3 nilai 0,743 atau lebih tinggi, dengan nilai VIF 1,346 atau kurang. Terakhir, nilai toleransi variabel X4 sebesar 0,968 atau lebih. Oleh karena itu, penyelidikan kami tidak menemukan masalah multikolonieritas antar variabel.

- Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  
Tabel 1 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	27,41	2,461		11,139	1
	Kompetensi Aparatur Desa	-0,188	0,049	-0,256	-3,861	0,001
	Sistem Pengendalian Internal	0,091	0,022	0,299	4,079	0,001
	Transparansi Pengelolaan Dana Desa	0,307	0,033	0,704	9,308	0,001
	Moralitas Individu	0,192	0,044	0,325	4,348	0,001

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pada tabel 2 Menghasilkan model untuk regresi linier berganda dengan persamaan berikut:

$$Y = a - b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 27,140 - 0,188X_1 + 0,091X_2 + 0,307X_3 + 0,192X_4$$

Persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta bernilai 27,410, artinya jika nilai Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi Pengelolaan Dana Desa, dan Moralitas Individu diasumsikan sama dengan 0, maka Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Dana Desa secara konstan akan bernilai sebesar 27,410.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel Kompetensi Aparatur Desa ( $X_1$ ) sebesar -0,256 artinya bahwa Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh negatif terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah Kompetensi Aparatur Desa sebesar 1 (satu) satuan maka akan menyebabkan nilai Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Dana Desa mengalami peningkatan sebesar 0,256 dan begitu juga sebaliknya.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) sebesar 0,299 artinya bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel Transparansi Pengelolaan Dana Desa ( $X_3$ ) sebesar 0,704 artinya bahwa Transparansi Pengelolaan Dana Desa berpengaruh

positif terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

5. Nilai koefisien regresi untuk variabel Moralitas Individu ( $X_4$ ) sebesar 0,325 artinya bahwa Moralitas Individu berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

## 4.2 Hasil Uji Hipotesis

### • Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Tabel 2 Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.799 <sup>a</sup>	0,638	0,621	1,301

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur, SPI, Transparansi, Moralitas

Kompetensi Aparatur Desa ( $X_1$ ), Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ), Transparansi Pengelolaan Dana Desa ( $X_3$ ), dan Moralitas Individu ( $X_4$ ) memiliki hubungan yang signifikan sebesar 79,9%, menurut hasil pengujian. R-kuadrat adalah 0,638 dalam skenario ini. Y menerima 36,2% dari X dan 63,8% dari X. Faktor independen tambahan menyumbang 33,8% (100% - 63,8%), namun tidak dieksplorasi di sini. Signifikansi pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen dihitung menjadi 0,621, atau 62,1%, setelah disesuaikan dengan beberapa korelasi.

### • Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Tabel 3 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	27,41	2,461		11,139	1
	Kompetensi Aparatur Desa	-0,188	0,049	-0,256	-3,861	0,001
	Sistem Pengendalian Internal	0,091	0,022	0,299	4,079	0,001
	Transparansi Pengelolaan Dana Desa	0,307	0,033	0,704	9,308	0,001
	Moralitas Individu	0,192	0,044	0,325	4,348	0,001

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Estimasi nilai t setiap variabel X dapat digunakan untuk memeringkat mereka dalam hal kepentingan. Hubungan yang signifikan antara X dan Y terjadi jika dan hanya

singkatnya, ketika nilai t melebihi nilai t kritis dari tabel t, atau ketika tingkat signifikansi di bawah 0,05 (5%), itu menunjukkan signifikansi statistik. Tabel t ditentukan dengan menggunakan rumus  $t_{tabel} = t(\alpha/2; n-k-1)$ , dimana n menyatakan jumlah pengamatan dan k menyatakan jumlah variabel bebas. Hasil Temuan menyoroti pentingnya etika pribadi warga desa selain kemandirian mesin masyarakat, kontrol internal, dan keterbukaan administrasi dana desa.

• Hasil Uji Signifikansi (Uji F)

Tabel 4 Uji Signifikansi (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model	Sum of Squares	df	Mean Squares	F	Sig	
1	Regression	253,87	4	63,469	37,52	.00'
	Residual	143,78	85	1,692		
	Total	397,66	89			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dai Desa  
 b. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur Desa, SPI, Transparans Moralitas Individu

Pengujian dilakukan secara simultan terhadap empat variabel independen (X1–X4): kompetensi aparatur desa (X1), sistem pengendalian intern (X2), transparansi pengelolaan dana desa (X3), dan moralitas individu (X4). "Nilai tabel F" mengacu pada jumlah tabel F atau nilai sig. jika kurang dari 5%, maka masuk akal untuk mempercayai teori tersebut.  $F(4; 90-4 = 86)$  dapat dihitung dengan menggunakan metode  $F_{tabel} = F(k; n-k)$ . Tes F untuk semua variabel independen penelitian mengungkapkan bahwa mereka semua menghasilkan efek simultan.

5.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Kompetensi daerah membatasi pencegahan penipuan dana desa, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan upaya pencegahan kecurangan, tidak memahami sistem pengelolaan dana desa, dan tidak menerima pelatihan teknis tentang akuntansi, maka dari itu perlu ditingkatkan lagi aparatur desa yang berkompeten dengan cara meningkatkan pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan

dana desa. Hasil temuan lapangan yang menyebabkan rendahnya kompetensi aparatur desa, berdasarkan sisi tingkat Pendidikan, lebih dari 50% orang yang menjawab memiliki pendidikan terakhir SMA. /Sederajat yaitu sebesar 80%. Kemudian disusul dengan responden yang berpendidikan Strata I (S1) yaitu sebesar 17%, selanjutnya responden berpendidikan Diploma 3 (D3) yaitu sebesar 2%, dan responden yang memiliki Pendidikan Strata II (S2) yaitu hanya 1%.

Untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa juga harus memiliki kompetensi serta kemampuan berupa keterampilan, pengetahuan, sikap dan perilaku yang di perlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka peningkatan kompetensi aparatur desa dapat dilakukan dengan pelatihan serta penyuluhan dengan mengikuti diklat mengenai pengelolaan keuangan dana desa, sehingga hal tersebut dapat menambah wawasan dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur desa berkaitan terhadap teori keagenan. Teori keagenan memiliki prinsip utama berupa hubungan kerja antara dua pihak yaitu pihak yang berwenang (*principal*) dengan pihak penerima wewenang (*agent*) dalam suatu bentuk kerja sama, pihak pemerintah desa sebagai agen akan berusaha menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan keinginan pemerintah pusat agar di masa mendatang bisa kembali memperoleh dana karena laporan keuangan memenuhi syarat.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Perhitungan di atas menunjukkan pentingnya pengendalian internal dalam menggagalkan aktivitas penipuan. Hal ini menunjukkan adanya peluang yang menjadi penyebab seseorang melakukan kecurangan, dan dapat dihindari dengan pengendalian internal organisasi yang efektif. Hasil penyelidikan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. Penipuan keuangan dapat dicegah sampai batas tertentu berkat sistem pengendalian internal, seperti yang ditemukan (Taufik et al., 2020).

Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa salah satu faktor

penyebab seseorang melakukan fraud yaitu adanya *opportunity* atau kesempatan dapat dicegah dengan adanya pengendalian internal yang baik pada suatu institusi atau organisasi. Dalam penelitian ini instrument yang digunakan dalam mengukur sistem pengendalian internal adalah menggunakan 5 unsur yang ada di dalam pengendalian internal. Unsur-unsur tersebut adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sistem pengendalian internal sangat berperah penting dalam menekan suatu peluang terjadinya kecurangan tersebut. Berkaitan dengan teori keagenan, teori ini mengasumsikan bahwa setiap individu bertindak untuk kepentingan masing-masing, pengendalian dan pengawasan yang kurang baik mencegah peluang untuk terjadinya *fraud* (Sahesti, 2015) untuk mencegah peluang tersebut diperlukan pengendalian internal yang efektif.

#### **Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pencegah Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan sumber dana desa mengurangi kecurangan, yang merupakan pertanda baik. Transparansi dalam administrasi keuangan desa mencegah terjadinya kecurangan (Gwijangge et al., 2021). Transparansi pengelolaan dana desa sebagai tolak ukur dari aparatur pemerintahan desa tersebut apakah mereka dapat mengelola anggaran dana desa dengan transparan yaitu terbuka kepada masyarakat, mudah mendapatkan akses informasi mengenai anggaran yang telah digunakan dalam satu tahun berjalan, terdapat spanduk/baliho mengenai pagu anggaran dana desa tersebut.

Berkaitan dengan *theory agency*, teori *agency* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pihak agen, maka dari itu pemerintah desa dituntut untuk transparan kepada masyarakat dan memberikan informasi yang aktual untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

#### **Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Contoh numerik ini menunjukkan pentingnya moral dalam mencegah penipuan. Ini menunjukkan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan kecurangan, yaitu adanya kesempatan atau peluang, dapat dicegah dengan moralitas individu yang baik, dan bermoral maka seseorang tidak akan melakukan hal tercela dengan menggunakan anggaran dana desa tidak sesuai atau sebagai kepentingan pribadi dan merugikan masyarakat setempat. Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan peneliti lain. Telah dikemukakan sebelumnya (Taufik *et al.*, 2020) moral setiap orang mencegah penipuan.

Moralitas berkaitan dengan teori perkembangan Kohlberg dimana semakin tinggi tahap moral seseorang, semakin terlihat moralitas yang lebih, untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, maka dari itu penting untuk setiap aparatur pemerintahan desa menanamkan moral yang lebih baik dalam diri individu, agar meminimalisir tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

#### **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi Pengelolaan Dana Desa, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Temuan menunjukkan bahwa nilai R2 adalah 0,799, yaitu 79,9 persen. Persentase ini menunjukkan bahwa pencegahan penyelewengan dana desa berpengaruh terhadap aparatur desa, sistem pengendalian internal, transparansi, dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa di Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan.

#### **5. SIMPULAN**

Kompetensi Aparatur Desa, SPI, Transparansi dan Moralitas Individu terbukti berpengaruh signifikan pada pencegahan fraud pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan Di Kabupaten Muaradua Kisam Provinsi OKU Selatan. Dalam hasil penelitian Kompetensi Perangkat Desa berdampak negatif terhadap Pencegahan Penipuan Pengelolaan Keuangan Dana Desa hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya kompetensi dalam aparatur pemerintah desa

sebagai tolak ukur dari aparaturnya pemerintahan desa tersebut apakah mereka memiliki kemampuan serta latar belakang yang memadai sehingga dapat menerapkan implementasi ilmu dan Pendidikan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dana desa agar dapat terlaksana dengan baik, dan menunjang usaha dalam penerapan pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa, maka dari itu perlu untuk meningkatkan kompetensi aparaturnya desa dalam usaha pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.

#### SARAN

Untuk peneliti lain yang ingin menyelidiki masalah yang sama, disarankan untuk memperdalam hasil temuan penelitian dengan menambahkan setiap item komponen variabel dari pertanyaan yang akan diajukan di dalam kuisisioner/angket, pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian bukan hanya pada tingkat kecamatan.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109–122. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18>
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sensitivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61. <https://doi.org/10.2871/vjra.v9i2.26125>
- Cahyadi, M. F., & Sujana, E. (2020). Pengaruh Religiusitas, Integritas, dan Penegakan Peraturan Terhadap Fraud pada Pengelolaan Keuangan Desa. 10(2), 136–145.
- Dennyningrat & Suputra, I. D. G. D. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Moralitas Individu pada Kesalahan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1170. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p13>.
- Gwijangge, Jati, Putri & Wirawati, (2021). *Akuntabilitas, Transparansi Pemerintah Desa dan Pengelolaan Dana Desa*. 1549–1560.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021. *Indonesia Corruption Watch*, 1–40.
- Iznillah, Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. CV Andi Offset.
- Kemenkeu. (2022). *Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022*. <http://djp.kemenkeu.go.id/>
- Kohlberg, L. (1995). *Tahap-tahap Perkembangan Moral*. Penerbit Kanisius.
- Melinda, F., Dewata, E., & Anggaeraini Oktarida. (2022). Penguatan Riset Akutansi Terapan dan Link Match Industri. *Paper Knowledge . Toward Media History of Documents*, 135(4).
- Pengelolaan keuangan daerah. (2022). *Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran*. BPKAD Kuningankab Go.Ig. <http://bpkad.kuningankab.go.id/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sahesti, I. G. A. (2015). *Pengaruh Corporate Governance dan Kualita Internal pada Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013*. E-jurnal Fakultas Ekonomi UMP, 1-16.
- Soleman, R. (2013). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(1), 57–74.

<https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.is1.art5>

- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Taufik, T., Nasir, A., & Riau, U. (2020). *The Influence Of Village Aparature Competence, Internal Control System and whistleblowing System on Fraud in Village Government With Individual Morality As Moderated Variables*.4(3).
- Wardani, D. K., Andriyani, & Ika. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2),8898.<https://doi.org/10.24964/ja.5i2.270>